

## 30 PKL yang Jualan di Trotoar Pasar Tanah Abang Ditertibkan

**TANAH ABANG (IM)** - Sebanyak 30 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditindak petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Senin (8/3).

Kepala Satpol PP Kecamatan Tanah Abang Budi Salamun mengatakan, penertiban ini dilakukan di tujuh lokasi. Petugas menyusuri kawasan yang biasa dijadikan lapak jualan oleh PKL, mulai dari Jalan Jati Baru 1 dan 2, Halte Transjakarta Stasiun Pasar Tanah Abang, jembatan penyeberangan multiguna (JPM), tikungan Blok G, wilayah Blok A dan B, serta Masjid Al Makmur. "Tadi kami sisir tujuh lo-

kasi tersebut. Kami dapati 30 PKL. Mereka gelar dagangan di (jalur) pedestrian sehingga kami tertibkan," ucap Budi Salamun, Senin (8/3).

Budi mengatakan, hasil sitaan yang dijarah dari 30 PKL dibawa ke gudang di Cakung, Jakarta Timur. Puluh petugas Satpol PP dan sejumlah truk diterjunkan dalam operasi ini.

"Kami angkut seperti gerobak, terpal, bangku, dimasukkan ke dalam truk," ujar Budi.

Budi menegaskan, kegiatan penertiban ini akan dilakukan secara rutin guna mencegah pedagang menggelar dagangannya di atas jalur pedestrian. ● **ber**

## Lima Kios Terbakar di Tanjung Priok

**TANJUNG PRIOK (IM)** - Lima kios di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kebakaran, Senin (8/3) pagi. Sempat terdengar ledakan dari kios yang letaknya di samping Mapolsek Tanjung Priok.

Salah satu warga setempat, Sutikno mengatakan, kebakaran terjadi saat ruko masih dalam keadaan tutup.

"Pas saya lihat kok ada asap di atap toko pulsa, enggak lama ada suara meledak, enggak begitu keras sih, itu dari meteran listrik kayaknya," kata Sutikno.

Sutikno mengatakan, api sangat cepat berkobar di atap counter handphone. Pemilik toko panik dan mencoba menyelamatkan diri. Sementara warga yang menyaksikan membantu mengeluarkan barang-barang dari dalam kios.

"Lalu tidak lama, datang blambir (pemadam kebakaran). Sejam kemudian lah baru bisa pada tuh api. Alhamdulillah sih enggak ada korban," tuturnya.

Kapolsek Tanjung Priok, Kopol Hadi Surtipri menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi Senin pagi,

berada di samping kanan, kurang lebih 25 meter dari Polsek.

"Kebakaran ini menyebabkan 5 kios terbakar, di antaranya counter HP dan toko penjual makanan burung," jelas Hadi saat di Mapolsek Tanjung Priok.

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko atau counter handphone.

"Diduga dari counter handphone, dan korban nihil karena pas saat kejadian kios belum buka dan tidak ada penghuninya," ujar Hadi.

"Untuk Polsek kita perlu antisipasi juga, kita persiapan apabila menyalah di wilayah kita. Namun demikian anggota siap dikomando, membantu kebakaran dan mengamankan lokasi" sambungnya.

Adapun dalam peristiwa ini, Hadi mengatakan pihaknya masih menyelidiki dan memeriksa pemilik maupun saksi.

"Kerugian masih kami hitung lalu pemilik kios dan penyewa kios serta warga sekitar 6 orang, masih dalam proses pemeriksaan," ujarnya. ● **osm**

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## AKSI HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan eksploitasi perempuan.

# Proyek Rusun DP Rp0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Sudah Bermasalah

Fraksi PDI-P DPRD DKI sejak awal sudah menyangsikan program rumah susun DP Rp0 karena banyak aturan yang sulit diimplementasikan di lapangan.

**JAKARTA (IM)** - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan tidak kaget Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah susun (rusun) dengan sistem pembayaran DP Rp 0.

Gembong mengatakan, program DP Rp 0 sejak awal

memang bermasalah.

"Memang program itu sejak awal bermasalah kok," kata Gembong, Senin (8/3).

Fraksi PDI-P DPRD DKI sejak awal sudah menyangsikan program tersebut karena ada banyak aturan yang sulit diimplementasikan di lapangan. Selain soal aturan pengadaan lahan, terdapat aturan lain yang harus diintegrasikan seperti aturan cicilan perbankan dan

lainnya.

"Kenapa sulit diimplementasikan di lapangan karena menyangkut aturan," kata Gembong.

Karena itu tidak heran, kata Gembong, program tersebut kini merembet ke masalah hukum.

Terkait persoalan hukum yang kini terjadi, Gembong meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan untuk Yoory.

"Kalau sekarang itu merembet ke persoalan hukum, kita harus patuh pada proses hukum saja," kata Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory setelah

dipastikan adanya penetapan status tersangka oleh KPK pada Jumat pekan lalu. Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Di-

rektur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin (8/3). ● **ber**

## PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Habib Rizieq

**AMPERA (IM)** - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan praperadilan penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizieq Shihab, Senin (8/3) pagi.

"MRS, kalau perkara Praperadilan no 11/pid.pra/2021/pn.jkt.sel sidangnya hari ini Senin 8 Maret 2021," ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haruno saat dihubungi,

Senin (8/3).

Berdasarkan pantauan, sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang.

Petugas tampak berjaga di dalam ruangan sidang yang bakal dijadikan tempat sidang praperadilan, di area PN, dan di luar area PN.

Selain itu, mobil taktis pun tampak mejeng di area PN Jaksel, baik di pekarangan area PN maupun di luar PN. ● **ber**

## Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi Dimanfaatkan Celah Sistem Pendataan

**JAKARTA (IM)** - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, oknum yang menyalahgunakan jatah vaksinasi bagi pedagang di Pasar Tanah Abang, memanfaatkan celah dari ketidaksiapan sistem pendataan.

Sebab tidak ada integrasi data penerima vaksin antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui PeduliLindungi dan data yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

Kejadian ini, menurut Teguh, mirip seperti kasus vaksinasi salah sasaran yang dilakukan oleh selebgram Helena Lim baru-baru ini.

"Helena Lim hanya memanfaatkan celah. Nah pedagang-pedagang (pasar) Tanah Abang juga memanfaatkan celah, ART dan kenalnya bisa masuk (vaksinasi)," kata, Minggu (7/3).

Teguh menjelaskan, pada awalnya, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi dikeluarkan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes. Dalam juknis tersebut, data penerima vaksin ditentukan oleh Kemenkes secara top-down, sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan penyuntikan. Seluruh data penerima vaksin berasal dari sistem PeduliLindungi.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, sistem tersebut tidak dapat melakukan klasifikasi sasaran penerima vaksin.

"Misalnya klasifikasi nakes, klasifikasi lansia, klasifikasi pedagang, itu tidak bisa," ucap Teguh.

Menurut Teguh, Dinkes DKI Jakarta berinisiatif untuk melakukan pendataan dengan menggandeng asosiasi dan organisasi untuk pendataan. Selain itu, ada kelonggaran bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang belum terdaftar dalam sistem.

Mereka, sebut Teguh, bisa mendapatkan vaksin setelah

memperoleh surat rekomendasi dari tempat kerjanya.

"(Pendataan) terpusat semuanya. Jadi Dinkes itu hanya cukup menerima bahwa ada dokumen yang diberikan oleh organisasi profesi, ada dokumen yang diberikan oleh si pemberi kerja. Itu. Dia enggak perlu melakukan verifikasi lagi. Karena pekerjaannya sudah banyak," ucap Teguh.

Selanjutnya, Ditjen P2P merevisi juknis pelaksanaan vaksinasi. Dalam revisi tersebut, pendataan dilakukan secara bottom-up. Para calon penerima vaksin bisa mendaftarkan dirinya secara online.

Para pedagang pasar di Tanah Abang, sebut Teguh, juga melakukan pendaftaran secara kolektif dan difasilitasi oleh PD Pasar Jaya. Namun sistem ini pun masih memiliki celah. Sebab, Dinkes DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya hanya perlu melakukan verifikasi dokumen dan bukan verifikasi faktual, apakah calon penerima vaksin benar-benar merupakan pedagang dan karyawan yang bekerja di Pasar Tanah Abang. Selain itu, data penerima vaksin juga belum terintegrasi.

"Karena data dari pendaftaran lewat PeduliLindungi dan data dari PD Pasar Jaya, itu sepertinya belum terintegrasi dengan data di PeduliLindungi," tutur Teguh.

Celah atau kelemahan dalam pendaftaran vaksinasi ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk mendaftarkan kerabat mereka agar bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di Pasar Tanah Abang. Padahal vaksinasi di pasar tersebut hanya menargetkan pedagang pasar dan karyawannya.

Penanggung jawab vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Siti Nur Halimah mengaku belum mengetahui adanya kenalan pedagang yang ikut mendapat jatah vaksinasi. Namun, ia menilai jika tersebut bisa saja terjadi jika pedagang memanfaatkan celah kelemahan pendaftaran vaksin. ● **osm**



FOTO: ANT

## PAMERAN FOTO PERINGATAN HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

Pengunjung mengamati karya foto yang ditampilkan dalam pameran foto di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia mengadakan pameran foto dan rangkaian talkshow bertajuk "Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa".

## Wagub DKI Minta Masyarakat Patuhi Penggunaan Jalur Sepeda

**JAKARTA (IM)** - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) ingin sepeda dijadikan sebagai alat transportasi. Sehingga sepeda tidak hanya untuk berolahraga atau rekreasi saja. Karena itu, Pemprov DKI terus meningkatkan jumlah jalur sepeda.

Seperti diketahui bahwa di Jakarta sudah ada jalur sepeda permanen. Hanya saja, jalur khusus untuk sepeda yang berada di Jalan Sudirman-Thamrin masih kerap diterobos pengemudi sepeda motor. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk mematuhi.

"Pertama kita bersyukur DKI Jakarta tahun ini terus meningkatkan jumlah jalur sepeda. Tahun ini juga akan kami kembangkan sampai 80 km. Ini satu prestasi dalam rangka memberikan kesempatan bagi pesepeda di jalur-jalur utama termasuk Jalur Sudirman-Thamrin. Kami ingin ke depan masyarakat kita menggunakan sepeda tidak hanya untuk kepentingan olahraga, rekreasi, tetapi ke depan bisa menjadi alat transportasi," kata Ariza di Jakarta, Senin (8/3).

Ia berharap masyarakat bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi penunjang aktivitas sehari-hari.

"Tugas pemprov menyiapkan regulasi, menyiapkan

koridor. Tugas masyarakat patuh dan taat pada regulasi yang ada, pada aturan yang ada. Semuanya tidak bisa ditimpakan kepada pemprov. Kami butuh kerja sama yang baik dari masyarakat," tambahnya.

"Tugas kami menyiapkan tempatnya, sarananya, koridornya, regulasi dan sebagainya, tugas masyarakat patuhi, taati agar tertib, disiplin dan memberi kesempatan semua. Yang pesepeda di jalurnya, tidak boleh menggunakan jalur lain. Sepeda motor juga jangan mengganggu jalur sepeda. Jadi masing-masing. Pejalan kaki ada di trotoar. Jangan pesepeda masuk ke trotoar. Apalagi motor masuk di trotoar," kata Ariza lebih lanjut.

Ariza menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun sebuah ekosistem transportasi yang baik agar bisa melayani masyarakat.

"Tidak boleh, jadi semua sudah kita atur ada kereta, ada LRT, ada MRT, ada busway, ada angkot, taksi, dan lain-lain ojek sampai sepeda motor semuanya sudah kita atur. Tugas pemprov membuat master plan transportasi sebaik mungkin. Dan alhamdulillah kita sudah keluar dari 10 besar dari kota macet. Mencapai sudah 31 ranking 31," kata Ariza. ● **osm**

## Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

**DUREN SAWIT (IM)** - Pesta pernikahan di RW 003 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dibubarkan aparat gabungan karena melanggar protokol kesehatan, Sabtu (6/3).

Kapolsek Duren Sawit Kopol Rensa Sastika mengatakan, pembubaran terjadi pukul 09.00 WIB.

"Pembubaran dilakukan

setelah kami dapat informasi dari warga. Acara pernikahan itu juga belum dapat izin keramaian," kata Rensa saat dihubungi, Minggu (7/3) sore.

Rensa menyebut, tamu yang datang juga banyak yang tidak mengenakan masker.

"Info dari masyarakat katanya pada tidak mematuhi protokol kesehatan. Acara sudah mulai, di tengah acara kami bubarkan," kata Rensa.

Pihak penyelenggara pun membuat surat permohonan maaf yang berisi perantaraan tidak mengulangi tindakan serupa selama pandemi.

"Ini kan aturan dari Pemda ya, dalam rangka PPKM mikro," kata Rensa.

Sanksinya dari Satpol PP, dari TNI dan Polri hanya mendampingi saja," ujar Rensa. ● **osm**

## Pemkot Bekasi Belajar Tata Kelola Keuangan kepada Pemkab Muba



FOTO:HUMAS PEMKOT BEKASI

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (kanan) saat berkunjung ke Pemkab Muba belum lama ini.

**KOTA BEKASI (IM)** - Dalam rangka penerapan atau pengadopsian terkait Laporan Keuangan Tercepat menurut Badan Pengelola Keuangan (BPK), Pemerintah Kota Bekasi memilih Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk sharing mengenai pembelajaran terhadap laporan keuangan setiap tahunnya, belum lama ini.

Dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Senin (8/3) disebutkan, dalam kunjungan itu Wali Kota Bekasi didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Nadih Arifin, Kepala Inspektorat, Widodo Indrijantoro, Staf Ahli Keuangan dan SDM, Ir. Bambang Santosa dan beberapa kepala dinas lain.

Rombongan Wali Kota

Bekasi diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs.H. Apriyadi M.Si mewakili Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Dodi Riza Alex yang tidak bisa hadir karena ada kunjungan kerja di Jakarta sekaligus mendampingi orang tua yang sedang dalam keadaan sakit.

Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengutarakan maksud kunjungannya untuk bersama sharing dalam tata kelola keuangan di pemerintahannya, sehingga Pemerintah Kota Bekasi akan mempelajari dan mengadopsi tata kelola keuangan yang tepat waktu. Karena direkomendasi BPK untuk belajar mengenai tata kelola keuangan di Kabupaten Muba.

"Kami jajaran langsung

berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal tata kelola keuangan sehingga bisa menerapkan yang terbaik di Pemerintah Kota Bekasi dalam hal perwujudan bersama mengatur wilayah masing-masing sehingga menjadi yang terbaik," ujar Rahmat Effendi.

Sekda Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. H. Apriyadi, M.Si menjelaskan, kunci mempercepat tata pengelolaan keuangan yakni menjalin hubungan harmonis dengan para anggota legislatif yang harus bisa sharing dengan BPKAD di Pemkab, dan tidak ada lagi pihak ketiga datang ke kantor BPKAD, karena masing-masing sudah terkoneksi pada bank, karena semuanya sudah memakai sistem aplikasi. ● **mdl**